



STRATEGI KOMUNIKASI SATUAN PETUGAS (SATGAS PPKS) KAMPUS DALAM MENANGANI KASUS PELECEHAN SEKSUAL

Eny Susilowati¹, Ernawati², Gadis Deslinda³, Adelia Nur Cahyani⁴

Abstrak

Kekerasan seksual yang terus meningkat di lingkungan perguruan tinggi menegaskan urgensi penguatan strategi komunikasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi komunikasi Satgas dalam melaksanakan fungsi pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual di kampus. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara, *Focus Group Discussion*, dan studi dokumentasi pada Satgas PPKS Universitas Sebelas Maret dan Universitas Islam Negeri Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Satgas dijalankan melalui koordinasi internal yang terstandar dan berkerahasiaan, kolaborasi eksternal dengan lembaga layanan dan aparat penegak hukum, serta diseminasi informasi publik berbasis literasi gender. Komunikasi empatik dan berperspektif korban terbukti berperan signifikan dalam membangun kepercayaan, mengurangi hambatan pelaporan, dan memperkuat budaya kampus yang aman.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Satgas PPKS, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Komunikasi.

Abstract

The continued rise in sexual violence in higher education institutions underscores the urgency of strengthening the communication strategy of the Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (Satgas PPKS). This study aims to describe the Task Force's communication strategy in carrying out its function of preventing, handling, and recovering victims of sexual violence on campus. The method used was a qualitative case study design through interviews, Focus Group Discussions, and documentation studies at the PPKS Task Force at Sebelas Maret University and Salatiga State Islamic University. The results show that the Task Force's communication strategy is implemented through standardized and confidential internal coordination, external collaboration with service agencies and law enforcement officials, and the dissemination of gender literacy-based public information. Empathetic and victim-centered communication has been shown to play a significant role in building trust, reducing barriers to reporting, and strengthening a safe campus culture.

Keywords: Communication Strategy, Satgas PPKS, Sexual Violence, Higher Education, Communication.

¹ UIN Raden Mas Said Surakarta email: eny.susilowati.72@gmail

² UIN Raden Mas Said Surakarta email: ernawati.293011@gmail.com

³ UIN Raden Mas Said Surakarta email: gdeslinda@gmail.com

⁴ UIN Raden Mas Said Surakarta email:

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi memiliki kedudukan strategis sebagai ruang pembentukan karakter, peningkatan kualitas akademik, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan (Pahlevi, 2017). Iklim pendidikan tinggi yang ideal menuntut tersedianya lingkungan pembelajaran yang aman, inklusif, serta bebas dari berbagai bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Keamanan dan kenyamanan civitas akademika bukan sekadar prasyarat pendukung proses pembelajaran, melainkan bagian integral dari keberhasilan perguruan tinggi dalam mewujudkan asas Tridharma yang berkelanjutan. Kampus sebagai institusi pengembang ilmu pengetahuan sekaligus wadah pembentukan kepribadian manusia berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak mahasiswa, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman dalam setiap aktivitas akademik dan sosial (Nurlailiya & Khasna 2016). Kualitas proses pembelajaran akan mengalami gangguan serius ketika dinamika kehidupan kampus tidak mampu memberikan perlindungan psikososial yang memadai bagi seluruh warga kampus.

Kasus kekerasan seksual yang marak terjadi dalam lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia menggambarkan tantangan krusial bagi sistem tata kelola kampus. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia per 1 Januari 2024 mencatat 8.202 kasus kekerasan seksual, dengan 1.807 korban berjenis kelamin laki-laki dan 7.158 berjenis kelamin Perempuan (Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak 2025). Data tersebut sekaligus mempertegas urgensi penguatan strategi perlindungan civitas akademika melalui pendekatan yang sistematis dan terukur. Laporan Komnas Perempuan dalam rentang 2015–2021 yang dipublikasikan melalui berita VOA Indonesia juga menemukan fakta bahwa perguruan tinggi menempati peringkat pertama lokasi terjadinya kekerasan seksual (Andriansyah 2022). Situasi ini mengindikasikan bahwa kampus, yang idealnya menjadi ruang aman, justru berpotensi menjadi arena kekerasan seksual yang bersifat terselubung maupun terbuka akibat relasi kuasa yang timpang, minimnya literasi kesadaran gender, dan belum optimalnya mekanisme pelaporan serta pendampingan bagi korban.

Rekaman peristiwa di sejumlah perguruan tinggi memperlihatkan betapa kasus kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada psikologis korban, tetapi juga berimplikasi pada citra institusi. Kasus pelecehan seksual oleh seorang dosen pembimbing terhadap mahasiswa pada 12 Juli 2024 di Universitas Muhammadiyah Surakarta menunjukkan bahwa kekerasan

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 4, October – December 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

seksual dapat terjadi bahkan dalam relasi akademik formal antara pembimbing dan mahasiswa. Di sisi lain Universitas Sebelas Maret (UNS) melalui Satgas PPKS tercatat menangani 42 kasus kekerasan seksual sepanjang 2022–2024, di mana sebagian besar korban maupun pelaku berasal dari kalangan mahasiswa. Lonjakan angka ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan insiden individual, melainkan fenomena sosial yang terstruktur di lingkungan akademik (Akmal, 2025). Data tersebut menandakan urgensi strategi preventif dan promotif yang dilakukan secara sistematis dan berbasis pendekatan komunikasi (Anugrahanto 2024).

Pemerintah telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai dasar hukum perlindungan warga kampus. Regulasi tersebut mengharuskan perguruan tinggi membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), lembaga yang memiliki mandat khusus dalam pencegahan, penanganan, pendampingan, serta pemulihan korban kekerasan seksual di lingkungan kampus (Permendikbudristek, 2021). Keberadaan Satgas tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, melainkan memainkan peran strategis dalam menciptakan sistem perlindungan terpadu yang menjunjung tinggi keselamatan, martabat, dan kerahasiaan korban. Dalam konteks ini strategi komunikasi menjadi unsur inti untuk membangun kepercayaan, menjamin transparansi prosedural, memperkuat partisipasi civitas akademika, dan memastikan pelaksanaan mandat Satgas berjalan berbasis keadilan restoratif (Ningsih, 2025).

Peran komunikasi semakin signifikan ketika Satgas menghadapi kompleksitas sosial dan struktural di lingkungan kampus. Penelitian terdahulu menegaskan relevansi komunikasi antar pribadi (KAP) sebagai pendekatan efektif dalam pencegahan *grooming* melalui ranah kognitif, afektif, dan konatif yang mampu mendorong perubahan pengetahuan, empati, dan tindakan (Rohmah, Fathurrijal, & Yusron Saudi, 2024). Komunikasi yang persuasif dan suportif membangun keberanian korban untuk melapor serta menumbuhkan sensitivitas kolektif terhadap potensi kekerasan seksual. Dampak psikologis yang dialami korban berupa kecemasan, ketakutan berlebihan, dan trauma pascakejadian menunjukkan bahwa akses terhadap dukungan komunikasi terapeutik merupakan kebutuhan mendesak dalam pemulihan mental korban (Pandor, Damang, & Syukur, 2023). Penanganan yang tidak tepat justru berpotensi menambah beban psikologis korban dan memperdalam luka sosial.

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 4, October – December 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

Implementasi Satgas PPKS tidak terlepas dari tantangan operasional. Risiko intimidasi, kriminalisasi, tekanan struktural, serta konflik kepentingan menjadi ancaman yang kerap dihadapi anggota Satgas ketika menjalankan mandatnya (Rachmiyati, Heriyanto, & Meilani, 2023). Pernyataan Inspektur Investigasi Itjen Kemendikbudristek, Lindung Saut Maruli, menegaskan bahwa anggota Satgas sering kali menjadi sasaran tekanan dalam upaya mengungkap kasus kekerasan seksual. Pengunduran diri Satgas PPKS Universitas Indonesia melalui pernyataan resmi di akun @ppks.ui memperlihatkan bagaimana hambatan komunikasi, minimnya dukungan pimpinan, mekanisme kerja lintas unit yang tidak jelas, serta absennya perlindungan bagi anggota Satgas dapat menghambat pelaksanaan tugas. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa strategi komunikasi bukan sekadar aspek teknis, melainkan fondasi keberhasilan penanganan kasus kekerasan seksual.

Urgensi penelitian ini berangkat dari realitas bahwa efektivitas Satgas PPKS sangat ditentukan oleh kemampuan merumuskan dan menerapkan strategi komunikasi yang responsif terhadap kebutuhan korban, pelaku, dan pemangku kepentingan kampus. Strategi komunikasi yang tepat memungkinkan terciptanya koordinasi yang harmonis, pemetaan risiko yang akurat, dan pemeliharaan integritas proses penanganan kasus (Yusuf et al. 2025). Dalam konteks empiris, perguruan tinggi di Jawa Tengah, khususnya Universitas Sebelas Maret dan Universitas Islam Negeri Salatiga memiliki dinamika yang menarik untuk dikaji karena keduanya telah menerapkan kebijakan PPKS sekaligus menangani laporan kekerasan seksual melalui Satgas PPKS. Pengalaman kedua kampus tersebut menyediakan ruang analisis yang luas mengenai pola komunikasi, bentuk sosialisasi, mekanisme advokasi, dan tantangan operasional dalam perlindungan civitas akademika.

Kajian ilmiah mengenai strategi komunikasi Satgas PPKS pada ranah pendidikan tinggi memiliki kontribusi akademik dan praktis. Secara teoretis penelitian ini memperkaya literatur mengenai manajemen komunikasi strategis dalam konteks perlindungan psikososial di lingkungan akademik. Secara praktis temuan penelitian diharapkan menjadi dasar formulasi rekomendasi yang dapat memperkuat implementasi kebijakan PPKS di perguruan tinggi, terutama pada aspek komunikasi preventif, responsif, dan pemulihan berbasis trauma. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi akan semakin terjamin ketika kampus mampu merawat ekosistem yang aman dan berkeadilan, memberikan perlindungan komprehensif kepada

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 4, October – December 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

seluruh civitas akademika, serta menegakkan prinsip kemanusiaan, etika akademik, dan profesionalitas dalam menangani kasus kekerasan seksual.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk mengkaji secara mendalam strategi komunikasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) pada dua perguruan tinggi di Jawa Tengah, yaitu Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Islam Negeri Salatiga. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali realitas empiris berdasarkan pengalaman langsung pelaksana Satgas dalam menjalankan praktik komunikasi kelembagaan, baik pada aspek pencegahan, penanganan, maupun pemulihan korban kekerasan seksual. Pemilihan lokasi dilakukan melalui pertimbangan variasi karakter institusional, sistem tata kelola, dan dinamika sosial budaya kampus agar diperoleh pemahaman komprehensif mengenai konstruksi strategi komunikasi dalam konteks pendidikan tinggi. Subjek penelitian terdiri atas ketua Satgas PPKS atau yang terlibat atau memiliki pengetahuan mengenai kegiatan sosialisasi, pendampingan, maupun advokasi kasus kekerasan seksual di kampus. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan bahwa setiap narasumber memiliki kompetensi dan keterlibatan langsung terhadap fenomena penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam terkait kebijakan, implementasi program, dan dinamika strategi komunikasi Satgas. *Focus Group Discussion* (FGD) digunakan untuk mengidentifikasi perspektif kolektif, menemukan kesamaan pola, serta mengungkap potensi hambatan dalam pelaksanaan strategi komunikasi lintas divisi Satgas. Studi dokumentasi diterapkan untuk menelusuri arsip kegiatan, pedoman internal, laporan rapat, publikasi kampus, dan dokumentasi visual sebagai penguat data empiris dan verifikasi pelaksanaan program komunikasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi teknik dan sumber dengan membandingkan hasil wawancara, FGD, dan dokumen institusional agar diperoleh temuan yang konsisten dan kredibel. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif sehingga proses analisis berlangsung simultan sejak pengumpulan data hingga penyusunan temuan akhir. Proses penelitian dijalankan selama satu tahun dengan penerapan

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 4, October – December 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

prinsip etika penelitian, yang mencakup kerahasiaan identitas informan, persetujuan partisipasi secara sukarela, perlindungan informasi sensitif terkait kekerasan seksual, serta pemanfaatan temuan hanya untuk tujuan akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Satgas PPKS di kedua perguruan tinggi berdiri sebagai unit strategis yang dibentuk berdasarkan mandat Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Kedudukan Satgas tidak terbatas pada peran administratif, namun berfungsi sebagai simpul koordinasi lintas lembaga. Informan mempertegas kedudukan tersebut melalui pernyataan verbatim bahwa *“Satgas PPKS diposisikan sebagai ‘hub kelembagaan’ bukan sekadar unit administratif penerima laporan, tetapi motor sinergi lintas fungsi di dalam dan di luar kampus.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan Satgas diproyeksikan agar mampu mengintegrasikan fungsi pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban secara simultan dan sistematis. Keberadaan Satgas menjadi semakin signifikan ketika dikontraskan dengan data riset BLA–BRIN 2023 yang menunjukkan bahwa empat dari sepuluh mahasiswa PTKN mengalami kekerasan seksual, dengan dominasi kekerasan kategori ringan seperti *catcalling* dan *body shaming* (46%), pelecehan fisik/verbal (18%), serta kekerasan berat berupa pemaksaan seksual dan relasi kuasa (24%). Situasi tersebut menegaskan bahwa urgensi pembentukan dan penguatan Satgas bukan sekadar tuntutan regulatif, namun merupakan kebutuhan struktural dalam menciptakan ruang akademik yang aman dan bebas kekerasan.

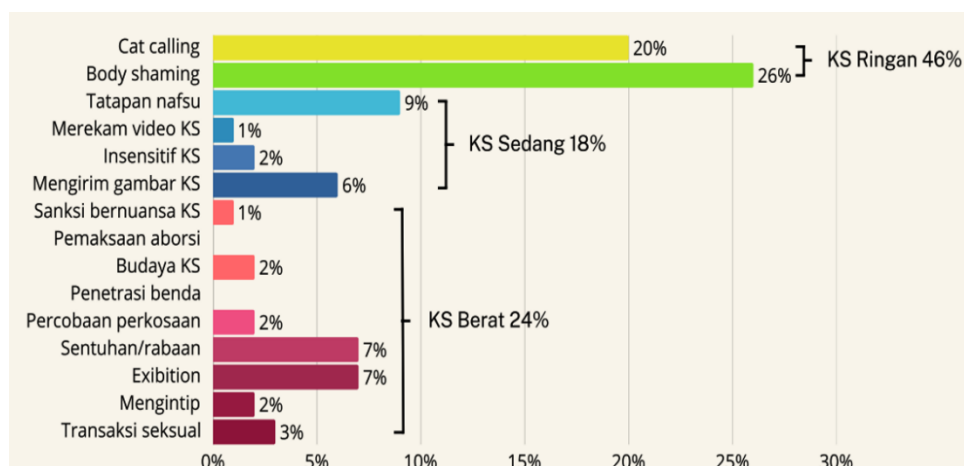


Gambar 1 Data Komnas Perempuan

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 4, October – December 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id



Gambar 2 Presentase Jenis Kekerasan (BLAS & BRIN 2023)

Struktur organisasi Satgas di kedua perguruan tinggi menunjukkan pola komposisi lintas unsur, mencakup pimpinan Perguruan Tinggi, PSGA, fakultas, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Informan 2 menjelaskan bahwa *“Struktur Satgas kami melibatkan pimpinan kampus, kepala PSGA, perwakilan fakultas, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Komposisi ini memastikan koordinasi lintas unit berjalan efektif. Satgas tidak hanya berfungsi administratif, tetapi menjadi simpul strategis dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.”* Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa struktur keanggotaan Satgas dirancang untuk mendorong kolaborasi menyeluruh antarunit akademik sekaligus memastikan representasi berbagai perspektif dalam proses pengambilan keputusan. Konsekuensinya, mekanisme internal Satgas mengutamakan koordinasi tertutup, distribusi kewenangan yang jelas, serta kontrol ketat atas informasi korban untuk menjaga independensi dan integritas lembaga. Komitmen tersebut diperkuat oleh verbatim informan lain yang menyatakan bahwa *“Satgas bekerja dengan prinsip kerahasiaan tinggi. Tidak semua anggota menangani kasus secara langsung karena hanya tim tertentu yang memiliki kewenangan. Proses penanganan tidak melibatkan pimpinan kampus secara langsung agar independensi dan kepercayaan korban tetap terjaga.”*

Tabel 1 Fase Pencegahan

Lembaga Mitra	Bentuk Sinergi	Mekanisme Koordinasi
Pimpinan PT (Rektor/Wakil Rektor)	Menetapkan kebijakan internal, menjamin dukungan anggaran dan sumber daya	Satgas menyusun Rencana Kerja Tahunan PPKS, disahkan oleh pimpinan PT
PSGA / Pusat Studi Gender	Penguatan literasi gender, riset, dan	Satgas dan PSGA Menyusun

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 4, October – December 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

dan Anak	kurikulum berperspektif gender	program bersama: sosialisasi, riset, modul pembelajaran
Penyuluh Agama dan Lembaga Dakwah Kampus (LDK)	Edukasi nilai keagamaan anti kekerasan, pembinaan moral mahasiswa	Satgas berkoordinasi dengan penyuluh dalam desain dakwah dan kegiatan rohani tematik
Dinas PPPA / UPTD PPA / LSM Gender	Kampanye dan advokasi budaya anti kekerasan	Satgas memfasilitasi pelatihan kader mahasiswa sebagai peer educator
Media Kampus	Kolaborasi sosialisasi dan edukasi public	Satgas menjalin MoU dengan mitra eksternal untuk program literasi dan pelatihan

Tabel 2 Fase Penanganan

Lembaga Mitra	Bentuk Sinergi	Mekanisme Koordinasi
Pimpinan PT	Otorisasi langkah administratif dan disiplin terhadap pelaku	Satgas melaporkan hasil klarifikasi dan rekomendasi; pimpinan menetapkan sanksi
Unit Layanan Konseling / Psikolog Kampus	Pendampingan psikologis korban dan pelaku	Satgas membuat rujukan formal dan memantau pemulihan
Penyuluh Agama	Konseling spiritual dan penguatan moral	Satgas menugaskan penyuluh untuk pemulihan spiritual korban/pelaku
UPTD PPA / LPSK / APH	Penegakan hukum, perlindungan saksi, pemulihan sosial	Satgas mengeluarkan surat rujukan resmi dan mendampingi koordinasi
PSGA / Pusat Riset Sosial Humaniora	Dokumentasi kasus untuk kebijakan dan perbaikan sistem	Satgas melibatkan PSGA dalam evaluasi dan pelaporan tahunan
Masyarakat Kampus & Alumni	Dukungan lingkungan sosial dan moral	Satgas menginisiasi jejaring “Kampus Peduli Korban” atau “We Care” di tingkat komunitas kampus

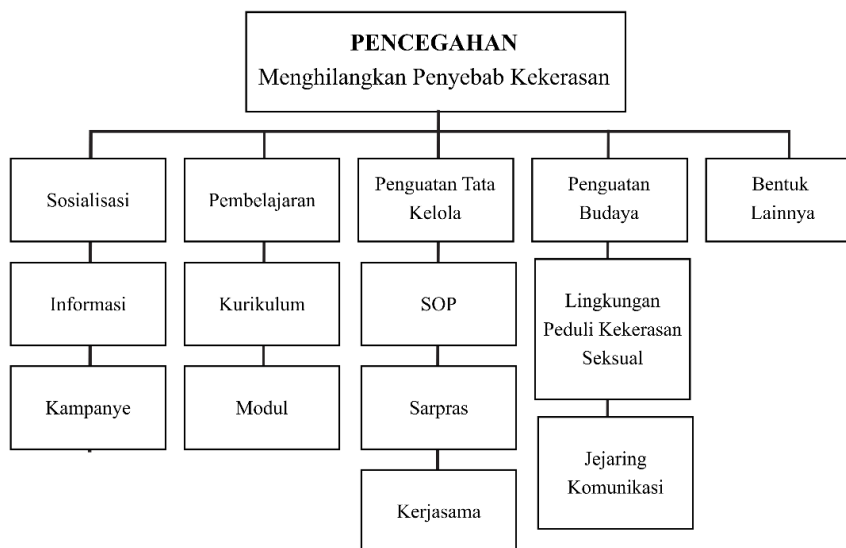
Proses penanganan kasus mengedepankan komunikasi empatik sebagai fondasi utama. Informan 1, sebagai Ketua Satgas, menegaskan bahwa *“Dalam menangani kasus kekerasan seksual, kami selalu menempatkan korban sebagai subjek yang berdaya. Komunikasi pertama yang kami lakukan harus menenangkan dan penuh empati, sebab di situlah letak kepercayaan dibangun. Jika komunikasi awal sudah salah arah, korban bisa menutup diri, dan proses penanganan akan terhambat.”* Penegasan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi empatik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen terapeutik, tetapi menjadi bagian integral dari asesmen awal yang menentukan keberhasilan keseluruhan proses penanganan. Informan tersebut juga menguraikan praktik koordinasi internal, yakni *“Kami sering mengadakan koordinasi singkat*

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 4, October – December 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

setelah menerima laporan. Tidak hanya untuk menentukan langkah penanganan, tetapi juga memastikan Bahasa komunikasi yang digunakan semua anggota tetap konsisten, sopan, dan tidak mengandung bias.” Praktik ini menunjukkan adanya standar komunikasi internal yang menjaga konsistensi pesan, menghindari bias linguistik, serta memastikan bahwa seluruh anggota memahami batas-batas etis dalam interaksi dengan korban.

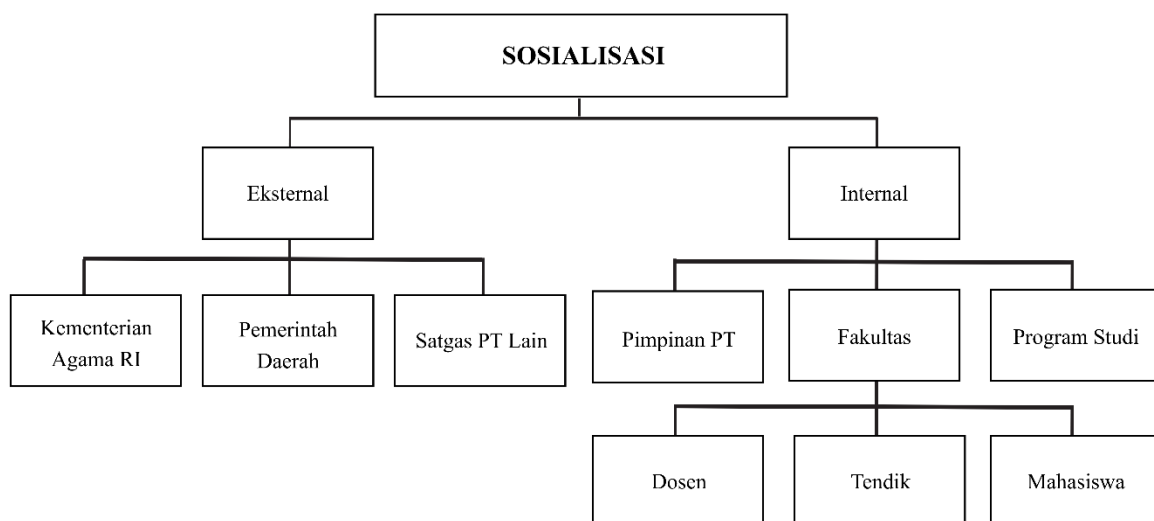


Gambar 3 Bagan Peran Lembaga dalam Strategi Komunikasi Satgas

No	Jenis Upaya	Bentuk Strategi Komunikasi Satgas PPKS
1.	Sosialisasi	Penyampaian informasi terkait kebijakan PPKS, pelaksanaan kampanye anti kekerasan seksual, serta kegiatan publikasi lainnya melalui media digital, media kampus, dan forum mahasiswa.
2.	Pembelajaran	Pengembangan kurikulum dan pembelajaran berbasis gender, pembuatan modul, buku, serta literatur edukatif. Penyelenggaraan pelatihan, <i>workshop</i> , halakah, atau kajian tematik mengenai isu kekerasan seksual dan kesetaraan gender.
3.	Penguatan Tata Kelola	Penyusunan standar prosedur operasional (SOP) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Penyediaan sarana dan prasarana pelaporan yang aman serta kerja sama dengan instansi terkait seperti UPTD PPA, LPSK, dan lembaga hukum.
4.	Penguatan Budaya	Pengenalan lingkungan kampus yang peduli pencegahan kekerasan seksual, penguatan nilai moral dan spiritual, serta pengembangan jejaring komunikasi antarlembaga dan komunitas mahasiswa.
5.	Kegiatan yang Sesuai dengan Kebutuhan	Pelaksanaan program kreatif berbasis kebutuhan lokal seperti forum diskusi, pementasan edukatif, dan kampanye digital yang disesuaikan dengan karakteristik kampus.

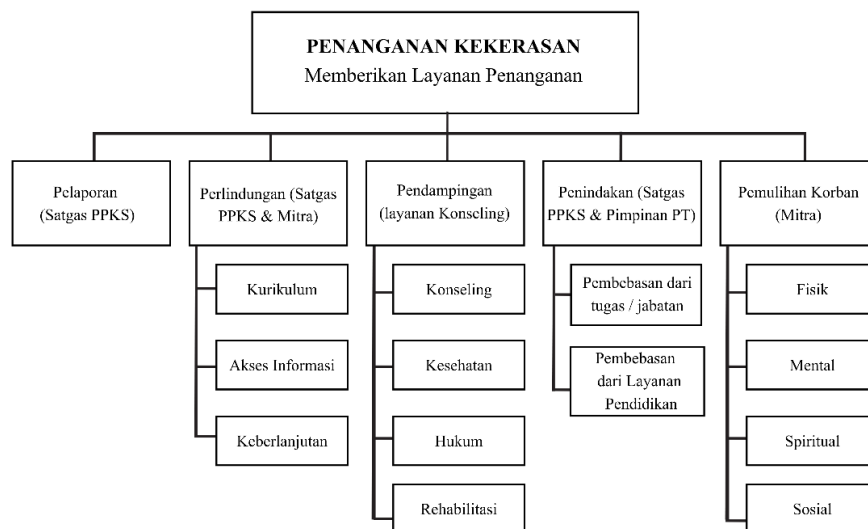
Pendekatan komunikasi pada UIN Salatiga menunjukkan integrasi yang khas melalui penguatan nilai religius dan spiritual. Informan 2 mengemukakan verbatim bahwa *“Di kampus kami, prinsipnya bukan hanya menyelesaikan kasus, tetapi juga memulihkan martabat dan rasa aman korban. Kami menggunakan pendekatan komunikasi yang penuh kasih, dengan Bahasa yang menenangkan agar korban merasa diterima dan tidak sendirian.”* Pendekatan tersebut menegaskan bahwa komunikasi yang ditujukan kepada korban tidak hanya bersifat penanganan administratif, namun juga mengandung nilai pemulihan psikologis. Informan yang sama menambahkan bahwa *“Kami sangat berhati-hati ketika harus berkomunikasi dengan pihak luar. Semua informasi harus disampaikan dengan izin korban dan tidak boleh membuka identitas. Prinsipnya adalah melindungi korban, bukan sekadar melaporkan kasus.”* Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa satgas memegang teguh prinsip *non-disclosure* yang melindungi privasi korban serta memperkuat kepercayaan antara korban dan lembaga.

Temuan penelitian juga memperlihatkan pendekatan khas dalam fase awal komunikasi dengan korban. Informan menyatakan bahwa *“Kami memulai komunikasi dengan membangun rasa aman. Tidak langsung menanyakan kronologi, tetapi mendengarkan dulu dengan empati. Itu yang membedakan antara komunikasi pendampingan dengan komunikasi administratif.”* Pernyataan tersebut menegaskan perbedaan paradigmatis antara komunikasi yang mendukung pemulihan dan komunikasi administratif yang berorientasi pendataan. Satgas berupaya menghindari pola wawancara yang dapat menambah trauma, sehingga kehadiran komunikasi empatik menjadi elemen yang memulihkan sekaligus mencegah reviktimisasi. Dalam konteks hambatan sosial-budaya, informan lain menjelaskan bahwa *“Stigma terhadap korban masih tinggi. Ada yang takut dinilai ‘berlebihan’, ada yang khawatir akan berdampak pada studinya. Jadi Satgas harus pelan-pelan membangun kepercayaan itu dengan komunikasi yang sabar.”* Paparan tersebut menggambarkan bahwa faktor kultural seperti patriarki dan budaya menyalahkan korban masih menjadi tantangan signifikan dalam proses komunikasi dan pelaporan kasus.



Gambar 4 Bagan Peran Lembaga Eksternal & Internal Kampus

Efektivitas strategi komunikasi Satgas terlihat dari perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran sivitas akademika. Informan 1 menyampaikan bahwa *“Dulu orang takut bicara, sekarang banyak yang mulai berani berkonsultasi bahkan sebelum kasus terjadi. Artinya, komunikasi preventif kami berjalan.”* Kutipan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi Satgas tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga dari meningkatnya *sense of safety* dan kesadaran preventif di lingkungan kampus. Informan 2 menambahkan bahwa *“Sekarang sudah mulai banyak mahasiswa yang ikut kegiatan Satgas, mereka aktif bertanya, bahkan menjadi relawan. Itu tanda bahwa komunikasi kami sudah diterima dengan baik.”* Pernyataan ini memperkuat temuan bahwa komunikasi publik Satgas memiliki dampak positif terhadap keterlibatan sivitas akademika dan penguatan budaya kampus anti kekerasan seksual.



Gambar 5 Bagan Penanganan Kekerasan

Temuan penelitian secara keseluruhan menegaskan bahwa strategi komunikasi Satgas PPKS berperan fundamental dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ketepatan pendekatan komunikasi empatik, keketatan koordinasi internal berbasis etika, serta efektivitas komunikasi publik menjadikan Satgas mampu mendorong perubahan budaya, membangun kepercayaan, dan menciptakan ekosistem kampus yang lebih aman. Implementasi strategi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Satgas tidak hanya bertumpu pada regulasi, tetapi terutama ditentukan oleh kualitas komunikasi yang berperspektif korban, konsisten, dan etis.

Discussion

Strategi komunikasi yang diterapkan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di lingkungan kampus merupakan implementasi konkret dari prinsip-prinsip komunikasi organisasi yang terencana, adaptif, dan berorientasi pada perubahan perilaku sosial. Keberadaan Satgas PPKS berfungsi sebagai perpanjangan tangan lembaga dalam menjalankan mandat Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Satgas bukan hanya sekadar unit administratif, tetapi juga sistem komunikasi kelembagaan yang bertugas membangun kesadaran, kepercayaan, dan koordinasi antaraktor kampus.

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 4, October – December 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

Konsep strategi komunikasi menjadi kunci utama bagi efektivitas Satgas PPKS. Raymond S. Ross (dalam Artarini and Tihurua 2024) mendefinisikan komunikasi sebagai proses menyortir, memilih, dan mengirimkan makna dari pikiran komunikator kepada komunikan agar tercapai kesamaan pemahaman. Definisi ini menekankan pentingnya kemampuan penyaringan pesan dalam mengelola isu sensitif, seperti kekerasan seksual, agar makna yang disampaikan tidak menimbulkan bias ataupun trauma baru. Proses komunikasi yang dilakukan Satgas PPKS mengacu pada prinsip seleksi dan penyaringan informasi, di mana setiap pesan disusun dengan hati-hati untuk memastikan substansinya sesuai dengan kondisi psikologis korban dan norma etis kelembagaan.

Pendekatan Ross beririsan dengan model Harold D. Lasswell, yang menyebut komunikasi sebagai proses menjawab lima unsur dasar: *Who says What, in Which Channel, to Whom, and with What Effect*. Dalam konteks Satgas PPKS, komunikator (Satgas) berperan menyampaikan pesan mengenai pencegahan, penanganan, dan pemulihan kepada audiens yang beragam, korban, pelaku, pimpinan kampus, dan masyarakat umum, melalui berbagai media, baik formal maupun nonformal. Efek yang diharapkan bukan hanya perubahan pengetahuan, tetapi juga pembentukan kesadaran dan perilaku sosial yang lebih responsif terhadap kekerasan seksual.

Kajian oleh Zamzami dan Sahana (2021) menegaskan bahwa gaya komunikasi merupakan seperangkat perilaku interpersonal khas yang menentukan bagaimana pesan disampaikan, diterima, dan diinterpretasikan. Gaya komunikasi yang digunakan Satgas PPKS di dua kampus yang diteliti (UNS dan UIN Salatiga) menunjukkan adanya perbedaan kontekstual. Satgas PPKS UNS cenderung mengadopsi gaya komunikasi organisatoris-birokratis, dengan pola komunikasi formal melalui rapat, surat keputusan, dan alur pelaporan resmi. Sementara Satgas PPKS UIN Salatiga menerapkan gaya komunikasi humanistik dan spiritual, menekankan empati, nilai moral, dan pendekatan personal terhadap korban. Dua gaya komunikasi ini menggambarkan keberagaman implementasi teori komunikasi organisasi yang disesuaikan dengan kultur lembaga masing-masing.

Goldhaber, 1986 (dalam Rahayuningsih, 2014) menegaskan bahwa komunikasi organisasi merupakan proses penciptaan dan pertukaran pesan dalam jaringan hubungan yang saling bergantung untuk menghadapi lingkungan yang dinamis dan tidak pasti. Pandangan ini

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 4, October – December 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

relevan dengan fungsi Satgas sebagai *hub kelembagaan* yang menghubungkan berbagai unsur, pimpinan perguruan tinggi, fakultas, lembaga konseling, mahasiswa, hingga aparat penegak hukum. Pola komunikasi yang dibangun bersifat dua arah (*two-way communication*), di mana setiap keputusan dihasilkan melalui koordinasi internal yang menjaga prinsip keterbukaan, kehati-hatian, dan kerahasiaan.

Menurut Argenti, P. A., Howell, R. A., & Beck (2005), strategi komunikasi merupakan pendekatan sistematis dalam perencanaan dan penyampaian pesan untuk mencapai tujuan tertentu. Satgas PPKS menerapkan strategi komunikasi yang dirancang dalam tiga dimensi:

1. Komunikasi Internal, yang berfungsi memastikan koordinasi antaranggota Satgas. Proses ini mencakup rapat rutin, penyusunan laporan, dan konsultasi teknis antarbidang, seperti pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Komunikasi internal bersifat terbatas, hanya melibatkan anggota dengan otorisasi tertentu demi menjaga kerahasiaan kasus.
2. Komunikasi Eksternal, yang dilakukan dengan lembaga eksternal seperti kepolisian, lembaga konseling, atau LSM pendamping korban. Komunikasi ini bersifat formal dan etis, dengan batasan yang diatur dalam kode etik Satgas.
3. Komunikasi Publik dan Edukatif, yang bertujuan menyebarkan informasi pencegahan kekerasan seksual kepada sivitas akademika melalui seminar, media sosial, kampanye anti-pelecehan, serta kerja sama antarunit di lingkungan kampus.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa strategi komunikasi Satgas PPKS telah mencerminkan tiga tujuan utama sebagaimana dikemukakan (Effendy, 2000) yakni *to secure understanding* (memastikan pemahaman), *to establish acceptance* (membangun penerimaan), dan *to motivate action* (mendorong tindakan). Pertama, Satgas memastikan pemahaman civitas akademika mengenai definisi, bentuk, dan dampak kekerasan seksual melalui edukasi dan sosialisasi berkala. Kedua, Satgas berupaya membangun penerimaan sosial terhadap keberadaan lembaga ini melalui transparansi dan kolaborasi. Ketiga, Satgas berupaya memotivasi tindakan kolektif, seperti pelaporan kasus, partisipasi mahasiswa dalam kegiatan edukatif, serta perubahan sikap terhadap isu gender dan kekerasan.

Rasyid (2018) mengemukakan bahwa strategi komunikasi adalah rancangan yang bertujuan memengaruhi perilaku individu maupun kelompok melalui transfer ide dan pesan.

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 4, October – December 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

Dalam penelitian ini, strategi komunikasi Satgas bertujuan mengubah paradigma masyarakat kampus dari budaya diam (*silent culture*) menuju budaya responsif dan peduli korban. Sosialisasi, pelatihan, dan kampanye publik merupakan bentuk konkret dari strategi ini, yang berfungsi membangun kesadaran kolektif serta menumbuhkan tanggung jawab sosial dalam komunitas akademik.

Analisis lapangan menunjukkan bahwa Satgas PPKS berpegang pada prinsip komunikasi edukatif, persuasif, dan informatif, sebagaimana dijelaskan oleh Wahyudi (1994). Teknik edukatif digunakan dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan mahasiswa mengenai pencegahan kekerasan seksual. Teknik persuasif digunakan dalam mendampingi korban dan menjalin koordinasi dengan fakultas. Sementara teknik informatif diterapkan melalui penyebaran panduan pelaporan kasus dan sosialisasi peraturan kampus. Penerapan ketiga teknik ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi Satgas bersifat adaptif dan multifungsi, menyesuaikan konteks situasi serta kebutuhan audiensnya.

Teori Purnamasica (2024) menegaskan bahwa strategi komunikasi berfungsi sebagai sarana untuk mengumumkan (*announcing*), memotivasi (*motivating*), mendidik (*educating*), dan menyebarkan informasi (*informing*). Satgas PPKS menjalankan keempat fungsi tersebut melalui kegiatan-kegiatan terencana: pengumuman hasil penanganan kasus yang telah disamakan identitasnya; pelatihan motivasional bagi mahasiswa; seminar dan kuliah umum edukatif; serta publikasi media informasi pencegahan. Strategi ini memperlihatkan integrasi antara fungsi komunikasi dengan misi kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, setara, dan bebas kekerasan.

Menurut Morissan (2013), komunikasi memiliki dimensi sosial yang berorientasi pada kebersamaan dan kesepahaman. Prinsip ini menjadi dasar etika komunikasi Satgas PPKS yang menekankan pada nilai empati, keadilan, dan kerahasiaan. Informan dari Satgas UIN Salatiga menyampaikan bahwa, “*Tidak semua anggota Satgas terlibat langsung dalam penanganan kasus. Hanya tim tertentu yang memiliki kewenangan, sementara pimpinan kampus tidak dilibatkan secara langsung agar independensi tetap terjaga.*” Pernyataan ini menunjukkan penerapan prinsip kerahasiaan dan profesionalitas dalam komunikasi internal lembaga.

Komunikasi organisasi yang efektif, menurut Fajar M. (2009) menuntut adanya koordinasi lintas unit dan integrasi pesan agar setiap pihak memiliki pemahaman yang sama

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 4, October – December 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

terhadap visi lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satgas di kedua kampus telah membangun sistem komunikasi yang memungkinkan penyamaan persepsi melalui rapat koordinatif, forum evaluasi, dan diskusi antarbidang. Namun dinamika komunikasi vertikal (antara Satgas dan pimpinan kampus) masih menghadapi tantangan berupa birokrasi dan sensitivitas isu, yang terkadang menghambat penyampaian pesan secara terbuka.

Zamzami & Sahana (2021) menggarisbawahi pentingnya mengenal karakteristik khalayak dalam menentukan strategi komunikasi. Satgas PPKS menerapkan prinsip ini melalui pemetaan audiens yang mencakup mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan pimpinan kampus. Setiap segmen mendapatkan pendekatan komunikasi berbeda: mahasiswa melalui kegiatan interaktif dan media sosial; dosen melalui forum akademik; serta pimpinan kampus melalui laporan resmi dan nota dinas. Strategi ini memperlihatkan bahwa komunikasi efektif menuntut kemampuan adaptasi dan diferensiasi pesan sesuai konteks sosial-budaya penerima.

Hasil riset BLA Semarang–BRIN (2023) menunjukkan bahwa empat dari sepuluh sivitas akademika PTKN pernah mengalami kekerasan seksual. Fakta ini memperkuat urgensi penerapan strategi komunikasi kelembagaan yang sistematis dan berkelanjutan. Dalam kerangka teori Argenti, P. A., Howell, R. A., & Beck (2005), keberhasilan strategi komunikasi bergantung pada kemampuan lembaga untuk membangun kredibilitas, mengelola persepsi, dan menumbuhkan partisipasi. Satgas PPKS memenuhi ketiga elemen tersebut dengan menunjukkan transparansi, ketegasan etis, serta konsistensi dalam menyampaikan pesan anti-kekerasan seksual.

Dengan mengacu pada Effendy (2000) dan R.Wayne Pace & Don F Faules (2006), strategi komunikasi Satgas PPKS dapat dikategorikan sebagai strategi komunikasi organisasi yang bersifat integratif. Tujuan komunikasi bukan hanya menyampaikan pesan, melainkan juga memastikan pemahaman (*understanding*), penerimaan (*acceptance*), dan tindakan (*action*). Dalam konteks penelitian ini, strategi komunikasi Satgas terbukti efektif dalam menumbuhkan kesadaran sivitas akademika dan memperkuat jejaring kelembagaan yang mendukung terwujudnya kampus aman dan berkeadilan gender.

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 4, October – December 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) memiliki kontribusi strategis dalam membentuk sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang efektif, responsif, dan berorientasi pada keberpihakan korban di lingkungan kampus. Dapat di gambarkan Strategi komunikasi yang dijalankan tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen koordinatif, edukatif, dan transformatif yang menegaskan peran Satgas sebagai ujung tombak perlindungan korban kekerasan seksual. Implementasi tiga dimensi komunikasi, internal, eksternal, dan publik, mewujudkan mekanisme komunikasi yang berlapis dan saling berkelindan, sehingga mendorong terciptanya sistem kerja Satgas yang profesional, beretika, serta adaptif terhadap kebutuhan psikososial korban. Efektivitas strategi tersebut diperkuat oleh kompetensi komunikasi interpersonal anggota Satgas, dukungan struktural institusi kampus, serta inovasi pemanfaatan media komunikasi digital sebagai medium kampanye dan sosialisasi.

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan penguatan sistem komunikasi Satgas PPKS melalui peningkatan kapasitas anggota Satgas secara berkelanjutan, khususnya dalam aspek penanganan berbasis trauma dan komunikasi berempati. Perguruan tinggi juga perlu memberikan dukungan struktural yang lebih komprehensif, baik dari segi regulasi, pendanaan, maupun penambahan sumber daya manusia agar pelaksanaan fungsi Satgas tidak bergantung pada personel yang terbatas. Selain itu, optimalisasi kolaborasi lintas sektor dengan lembaga penyedia layanan, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat sipil perlu terus diperluas untuk memperkuat sistem perlindungan bagi korban. Upaya sosialisasi dan kampanye publik idealnya dilakukan secara masif dan berkelanjutan guna meningkatkan literasi sivitas akademika tentang kekerasan seksual dan meminimalkan resistensi budaya patriarkal, sehingga budaya kampus yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan dapat terwujud secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Fauziah. 2025. "Kasus Kekerasan Di Lingkungan Kampus UNS Mengerikan, Ini Langkah Yang Dilakukan Rektorat." *Jawa Pos: Radar Solo*. Retrieved (<https://radarsolo.jawapos.com/pendidikan/845166962/kasus-kekerasan-di-lingkungan-kampus-uns-mengerikan-ini-langkah-yang-dilakukan-rektorat>).
- Andriansyah, Anugrah. 2022. "Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi Di Universitas." *VOA Indonesia*. Retrieved January 22, 2025 (<https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html>).
- Anugrahanto, Nino Citra. 2024. "UMS Kembali Diterpa Dugaan Pelecehan Seksual, Terduga Pelaku Petinggi Fakultas." *Kompas.Id*. Retrieved (<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/07/11/ums-kembali-diterpa-dugaan-pelecehan-seksual-terduga-pelaku-petinggi-fakultas>).
- Argenti, P. A., Howell, R. A., & Beck, K. A. 2005. *The Strategic Communication Imperative. MIT Sloan Management Review*.
- Artarini, Hidayanti, and Firna Tihurua. 2024. "Strategi Komunikasi Organisasi Dalam Menunjang Pelayanan Publik Komisi Penyiaran Indonesia (Studi Kasus KPI Pusat)." *Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi IV*(2):1–47.
- Effendy, Onong Uchjana. 2000. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fajar M. 2009. *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Graham Ilmu.
- Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. 2025. "Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi : Tahun 2025." *SIMFONI-PPA*. Retrieved September 9, 2025 (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>).
- Morissan. 2013. *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana.
- Ningsih, Siti Wida. 2025. "Pola Komunikasi Satgas PPKS Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Lambung Mangkurat." 2(November 2024):110–16.
- Nurlailiya, Iis, and Syarifa Khasna. 2016. "Hak Pendidikan Sebagai Hak Asasi : Studi Tentang Pemenuhan Hak Mahasiswa Disabilitas Di Pekalongan Manabia : Journal of Consitutional Law."
- Pahlevi, Farida Sekti, and Pendidikan Kewarganegaraan. 2017. "Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Dalam Memperkokoh Karakter Bangsa Indonesia."
- Pandor, Pius, Mauritius Damang, and Robertus Syukur. 2023. "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus (Relasi Aku Dan Liyan Armada Riyanto)." *Jurnal Filsafat Indonesia* 6(1):115–25. doi: 10.23887/jfi.v6i1.42178.
- Permendikbudristek. 2021. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia*.
- Purnamasica, Angetrisha Merici. 2024. "Strategi Komunikasi Satgas PPKS Universitas Atma Jaya Yogyakarta Untuk Menyuarakan Isu Gender Dan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus." *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(1):32–41.
- R.Wayne Pace & Don F Faules. 2006. *Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja*

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 4, October – December 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

- Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rachmiyati, Andi, Meyzi Heriyanto, and Nur Laila Meilani. 2023. “Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Implementation Of Sexual Violence Prevention And Handling Policy In The University Environment (Case Study At Riau University In 2021-2023).” *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan* 12(3):1–15.
- Rahayuningsih, Idha. 2014. “Komunikasi Lintas Budaya Dalam Organisasi.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9(Agustus):91–100.
- Rasyid, Abd. 2018. *Perubahan Sosial Dan Strategi Komunikasi*. Purwosari: Wade Group.
- Rohmah, Nurliya Ni’matul, Fathurrijal, and Yusron Saudi. 2024. “Interpersonal Communication Strategy to Prevent Grooming in West Nusa Tenggara.” *Al-Jamahiria : Jurnal Komunikasi Dan Dakwah Islam* 2(1):30–41. doi: 10.30983/al-jamahiria.v2i1.8436.
- Wahyudi, J. .. 1994. *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*. Jakarta: Penerbit Gramdeia.
- Yusuf, Dian, Wina Puspita Sari, Asep Soegiarto, Muria Putriana, and Menati Fajar Rizki. 2025. “Strategi Komunikasi Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menginformasikan Layanan SAPA 129.” (1):1–12.
- Zamzami, and Wili Sahana. 2021. “Strategi Komunikasi Organisasi.” *Journal Educational Research and Social Studies* Volume 2 N:27.